Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP)
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp
ISSN: 2775-0590 (*online*) ISSN: 2665-3856 (*Print*)
Vol. 7 No. 2 2025
Hal. 137-146

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BANK SAMPAH DI KOTA PALEMBANG

Alverina Sintia Karyaeni[1*], Nadhya Dianisya Alza[2], Junaidi[3], Yolla Sakinah Tasti[4], I Gusti Ayu Kharisya Kartika Maharani Asmara[5], Mai Ririn RahmaDita[6]

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya [1,2,3,4,5,6]
alverinasintia784@gmail.com[*]

Abstract

This study examines the institutional problems of waste banks in Palembang City and identifies the most feasible policy alternatives to improve the effectiveness of urban waste management. A qualitative descriptive method was used, with data collected through in depth interviews with waste bank managers and the Municipal Environmental Agency (DLHK), field observations of Kartini (active) and Kamboja (inactive) waste banks, and documentation analysis. The findings show that most waste banks do not function optimally due to weak institutional capacity, including limited human resources, damaged facilities, manual record-keeping, and the absence of standardized Standard Operating Procedures (SOPs). Policy implementation has been inconsistent because of limited assistance and the lack of a sustainable guidance mechanism. Evaluation of two policy alternatives based on effectiveness, efficiency, equity, political feasibility, and administrative feasibility indicates that strengthening the institutional capacity of waste banks is the most feasible option, as it directly addresses core operational problems. Digitalization of the waste bank system is considered a complementary strategy but cannot be implemented effectively without a strong institutional foundation. The recommended policies include developing standardized SOPs, providing managerial training, improving facilities, establishing clear organizational structures, and ensuring routine monitoring by DLHK. Digitalization should be implemented gradually after basic institutional capacities are strengthened. These findings highlight institutional strengthening as the key prerequisite for improving waste bank performance and supporting urban waste reduction.

Keywords: *Policy Analysis, Institutional Strengthening, Waste Bank*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan kelembagaan bank sampah serta menghasilkan alternatif kebijakan yang paling layak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pengelola Bank Sampah dan DLHK. Observasi lapangan juga dilakukan pada dua unit bank sampah dengan kondisi berbeda yaitu Bank Sampah Kartini sebagai unit yang masih beroperasi dan Bank Sampah Kamboja sebagai unit yang tidak beroperasi Data juga diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bank sampah di Palembang tidak berfungsi optimal akibat lemahnya kapasitas kelembagaan, termasuk SDM

terbatas, fasilitas rusak, pencatatan manual, serta ketiadaan SOP seragam sesuai Permen LHK 14/2021. Implementasi kebijakan tidak berjalan konsisten karena minimnya pendampingan dan ketiadaan mekanisme pembinaan berkelanjutan. Hasil evaluasi terhadap 2 alternatif kebijakan menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan politik, dan kelayakan administratif dari Dunn dan Patton menunjukkan bahwa Alternatif kebijakan penguatan kelembagaan Bank Sampah merupakan opsi paling layak direkomendasikan karena secara langsung menjawab akar permasalahan operasional. Adapun Alternatif kebijakan digitalisasi Sistem Bank Sampah dinilai mendukung tetapi tidak dapat berjalan optimal tanpa fondasi kelembagaan yang kuat. Rekomendasi kebijakan berfokus pada penyusunan SOP standar, pelatihan pengurus, perbaikan fasilitas, pembentukan struktur organisasi yang jelas, serta monitoring rutin oleh DLHK. Digitalisasi disarankan diterapkan bertahap setelah kapasitas dasar terpenuhi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan bank sampah bergantung pada penguatan kelembagaan sebagai prasyarat utama bagi peningkatan kinerja dan kontribusi terhadap pengurangan timbunan sampah kota.

Kata kunci: Analisis Kebijakan, Penguatan Kelembagaan dan Bank Sampah

PENDAHULUAN

Volume sampah di Kota Palembang setiap tahun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Data SIPSN menunjukkan bahwa timbunan sampah mencapai 1.204,97 ton per hari. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang menyebutkan bahwa jumlah sampah diwilayah 18 Kecamatan menjadi meningkat hingga 50 persen saat momen lebaran 2025 dari potensi 1.240 ton menjadi 1.600 ton per hari (Pramana, 2025), Bahkan Pemerintah Kota Palembang mengungkapkan pada situs resminya bahwa mau tidak mau, pengentasan sampah harus cepat ditanggulangi, terlebih volume sampah di Kota Palembang mencapai 1.500 ton per hari (JDIH Kota Palembang, 2025).

Besarnya volume sampah ini mempercepat penumpukan dan membuat kapasitas TPA semakin tertekan. Ketika bank sampah tidak berfungsi secara maksimal, aliran sampah dari masyarakat langsung menuju TPA tanpa ada proses pengurangan terlebih dahulu, sehingga memperburuk kondisi TPA yang semakin cepat penuh. Dengan demikian, lemahnya kelembagaan bank sampah yang ditandai oleh keterbatasan pendanaan, minimnya SDM aktif, rendahnya nilai ekonomi sampah, serta kurang stabilnya partisipasi masyarakat berkontribusi pada tingginya volume sampah yang masuk ke TPA dan mempercepat terjadinya over kapasitas.

Bank sampah menjadi instrumen yang diandalkan oleh regulasi seperti UU 18/2008, PP 81/2012, Permen LHK 14/2021, dan Perda Kota Palembang No. 3 Tahun 2015 sebagai mekanisme partisipatif berbasis masyarakat. Meskipun demikian, bank sampah di Palembang belum mampu menjalankan peran strategis tersebut secara optimal, yang terlihat dari banyaknya unit yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Permasalahan utama yang ditemukan berada pada aspek kelembagaan bank sampah, terutama menyangkut lemahnya struktur organisasi, kapasitas operasional, dan sistem pendukung yang seharusnya menopang keberjalanan layanan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak peralatan inti seperti mesin pencacah dan mesin press tidak dapat digunakan, sehingga proses pengolahan tidak berjalan. Pencatatan masih dilakukan secara manual, menyebabkan dokumentasi data tidak akurat dan sering tertunda. Jumlah pengurus aktif yang hanya sedikit menghambat kelancaran kerja, membuat tugas-tugas sederhana tertunda hingga berhari-hari. Layanan kepada masyarakat tidak stabil dan jam operasional tidak konsisten, sehingga warga enggan menyetorkan sampah karena tidak ada kepastian layanan. Kondisi empiris tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan bank sampah belum memiliki kapasitas operasional yang memadai untuk mendukung tujuan pengurangan sampah dari sumber (Agustin, 2023).

Faktor penyebab masalah ini antara lain tidak adanya pendampingan berkelanjutan dari DLHK, ketiadaan SOP yang seragam, keterbatasan kemampuan teknis pengurus dalam mengoperasikan fasilitas, serta tidak tersedianya dukungan pendanaan untuk pemeliharaan peralatan. Regulasi telah mengatur fungsi dan

standar bank sampah, tetapi belum menyediakan mekanisme pembinaan, monitoring, dan dukungan administratif yang memadai untuk memastikan keberlanjutan operasional. Ketika pendampingan DLHK terhenti, performa bank sampah menurun drastis, memperlihatkan ketergantungan yang tinggi pada dukungan eksternal dan belum adanya kelembagaan yang mandiri (Anwar, 2023).

Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada menurunnya efektivitas bank sampah dalam mendukung kebijakan pengurangan sampah. Ketidakstabilan layanan menyebabkan partisipasi masyarakat rendah, sehingga volume sampah yang berhasil dikelola bank sampah tidak sebanding dengan timbulan kota yang mencapai lebih dari seribu ton per hari berdasarkan data SIPSN. Rendahnya kontribusi ini berpotensi meningkatkan beban TPA dan menghambat pencapaian target pengurangan sampah berbasis sumber. Dampak jangka panjangnya berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program bank sampah dan menurunnya efektivitas instrumen kebijakan yang telah disiapkan pemerintah.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai bank sampah sebagian besar berfokus pada aspek teknis, edukasi lingkungan, digitalisasi, atau studi kasus operasional. (Widodo & Tarigan, 2025) menemukan bahwa program penyuluhan mampu meningkatkan kapasitas pengurus dan partisipasi masyarakat secara signifikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola dalam manajemen operasional, administrasi, serta pengelolaan keuangan Bank Sampah. Penyuluhan pemilahan sampah juga berdampak positif, ditandai dengan kenaikan pemahaman masyarakat dari 30% menjadi 90% setelah kegiatan dilakukan. Selain itu, penelitian ini mencatat adanya dampak ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan serta perubahan perilaku yang lebih sadar lingkungan, meskipun masih terdapat tantangan berupa kurangnya konsistensi partisipasi dan perlunya pelatihan berkelanjutan

Sedangkan, penelitian lain (Prasanti & Yudhastuti, 2023). menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Bank Sampah Rukmi dilakukan oleh warga sebagai nasabah yang memilah sampah dari rumah dan mengumpulkannya di bank sampah. Sampah yang terkumpul kemudian dijual ke Bank Sampah Induk (BSI) Surabaya. Selain pemilahan dan pengumpulan, Bank Sampah Rukmi juga memanfaatkan kembali sampah seperti wadah minyak bekas dan gelas mineral menjadi pot tanaman, serta mengolah sampah organik menjadi kompos dan *eco enzyme*, dan minyak jelantah menjadi lilin aroma. Pengelolaan lingkungan juga dilakukan melalui penanaman pohon. Kegiatan tersebut mampu meningkatkan pendapatan nasabah, menyehatkan lingkungan, serta mendukung kesehatan.

Selanjutnya, penelitian Adityo & Alya (2024) menunjukkan bahwa menggabungkan berbagai program gerakan masyarakat peduli sampah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, pengumpulan sampah, dan pembuatan briket dari sampah yang terkelola. Studi ini memberikan pedoman dan saran praktis untuk mengelola bank sampah dengan pendekatan yang melibatkan Masyarakat.

Selain itu Fitriana et al. (2024) dalam penelitiannya mengenai peran kelembagaan Bank Sampah Nawasena Kemala di Desa Daleman Kidul menemukan bahwa pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat desa mampu memperkuat sistem pengolahan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah organik maupun non-organik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan kelembagaan desa berhasil menata kembali pola pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah yang sebelumnya tidak optimal. Selain itu, aktivitas pengabdian ini meningkatkan partisipasi warga, memperbaiki sistem administrasi bank sampah, dan menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti pupuk kompos, maggot, serta kerajinan daur ulang. Lembaga Nawasena Kemala juga menjadi pusat penguatan ekonomi masyarakat melalui program tabungan sampah dan penggunaan aplikasi digital MySmash yang memudahkan pencatatan serta mendorong keberlanjutan program Fitriana et al. (2024).

Hasil penelitian Sukmaniar et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di perkotaan sangat memerlukan partisipasi antara pemerintah dan masyarakat, artinya pemerintah harus membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah dan masyarakat harus berperan aktif dalam mengelola sampah tersebut. Hasil lainnya yaitu bank sampah dapat menjadi solusi alternatif dalam mengelola sampah di perkotaan. Bank sampah dapat mengedukasi kebiasakan masyarakat dalam mengolah sampah yang bernilai ekonomis dan meningkatan pendapaan, melalui kebiasaan memilah sampah atau membedakan sampah organik dan anorganik, sebelum diletakkan pada bank sampah. Selain itu juga, adanya bank sampah dapat meringankan

pemerintah dalam mengangkut sampah pada tempat pembuangan akhir, karena sebagian sampah telah ditempatkan di bank sampah.

Berbagai penelitian tentang Bank sampah sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan bank sampah belum dikaji dalam kerangka analisis kebijakan. Masalah kapasitas kelembagaan dan implementasi regulasi belum banyak dibahas melalui pendekatan analisis kebijakan menggunakan kriteria seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Atas keterbatasan riset sebelumnya tersebut maka penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian pengelolaan bank sampah dari teori Analisis kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan kelembagaan bank sampah serta menghasilkan alternatif kebijakan yang paling layak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Palembang. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan berorientasi penguatan kelembagaan agar bank sampah mampu berfungsi sebagai instrumen pengurangan sampah dari sumber secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam kondisi kelembagaan bank sampah di Kota Palembang serta menganalisis faktor penyebab, efektivitas operasional, dan kebutuhan penguatan kebijakan. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan pada Bank Sampah Kartini sebagai unit yang masih beroperasi dan Bank Sampah Kamboja sebagai unit yang tidak beroperasi untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai keberfungsian fasilitas, aktivitas pengurus, dan pola operasional. Wawancara mendalam dilakukan juga kepada pengelola Bank Sampah Kartini, mantan pengelola Bank Sampah Kamboja, dan Kepala DLHK Kota Palembang yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan seluruh bank sampah. Dokumentasi berupa foto kondisi peralatan, catatan lapangan, data DLHK, serta data timbulan sampah dari SIPSN digunakan sebagai penguat temuan. Studi literatur melalui jurnal, regulasi, laporan pemerintah, dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis dan membandingkan temuan lapangan dengan konteks teoretis.

Proses evaluasi alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan kriteria analisis kebijakan dari Dunn (2018) serta Patton et al. (2016) meliputi efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Setiap kriteria diberi skala penilaian 1-3 untuk memastikan proses evaluasi berlangsung lebih objektif dan terukur. Penerapan kriteria ini menjadi bagian integral dari analisis data karena digunakan untuk menilai kelayakan setiap alternatif kebijakan, sehingga keputusan akhir yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Adapun Analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif dari Miles & Huberman (1992). (Fadjarajani et al., 2020). Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Keempat alur tersebut adalah (1) *Data Collection*; (2) *Data Display*; dan (3) *Data Condensation*; (4) *Conclusions: Drawing/Verifying.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernyataan Kebijakan

Tujuan analisis kebijakan ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kondisi kelembagaan bank sampah di Kota Palembang, termasuk efektivitas operasional, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan fasilitas pendukung. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan faktor-faktor yang menyebabkan bank sampah belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga pengelolaan sampah dari sumbernya masih belum maksimal. Temuan wawancara mendukung kondisi tersebut, di mana pengelola Bank Sampah Kartini menyatakan bahwa meskipun struktur organisasi cukup lengkap, hanya empat orang pengurus yang masih aktif, sehingga pemilahan sampah dilakukan oleh satu orang saja selama dua hingga tiga jam per hari. Kondisi fasilitas juga menjadi hambatan, karena mesin pencacah, mesin kompos, dan alat produksi pupuk tidak lagi beroperasi akibat kerusakan dan keterbatasan biaya perawatan. Partisipasi masyarakat pun belum stabil, sebagian warga masih enggan memilah sampah karena dinilai merepotkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan bank sampah belum memiliki kapasitas operasional yang cukup untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan timbulan sampah.

Profil kebijakan yang akan dihasilkan dari analisis kebijakan adalah kebijakan yang dapat memperkuat kelembagaan bank sampah sebagai upaya untuk mengurangi timbunan sampah di Kota Palembang. Kebijakan ini fokus pada peningkatan kapasitas organisasi bank sampah

melalui perbaikan struktur kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan operasional. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan daur ulang sampah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan bank sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga mampu mengurangi beban TPA Sukawinatan secara signifikan dan mendukung pembangunan lingkungan yang bersih dan sehat.

Kriteria Evaluasi

Evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan kriteria dari Dunn (2018) dan Patton et al. (2016) yaitu efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Setiap kriteria dibuat Skala penilaian 1-3. Hal ini dilakukan agar penilaian dapat dilakukan secara objektif. Kriteria tersebut digunakan untuk menilai kelayakan dari masing-masing alternatif kebijakan agar menghasilkan pilihan yang paling sesuai dengan kondisi nyata.

Kriteria efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan penguatan kelembagaan bank sampah dalam mengurangi timbunan sampah dari sumbernya. Nilai 1 (rendah) menggambarkan kondisi seperti saat ini, dimana kelembagaan bank sampah masih lemah, banyak unit tidak aktif, partisipasi masyarakat tidak stabil, dan peralatan operasional rusak, sehingga kebijakan belum berdampak pada pengurangan sampah ke TPA. Nilai 2 (sedang) menunjukkan efektivitas yang mulai terlihat, misalnya ketika sebagian unit bank sampah aktif, fasilitas mulai berfungsi, dan ada peningkatan partisipasi meskipun belum merata. Nilai 3 (tinggi) berarti kebijakan mampu memperkuat kelembagaan secara signifikan, ditandai dengan peningkatan operasional seluruh unit, stabilnya partisipasi masyarakat, dan tercapainya pengurangan sampah yang berdampak pada penurunan volume sampah masuk ke TPA.

Dalam konteks bank sampah di Palembang, efisiensi berkaitan dengan kemampuan mengelola sampah secara optimal meskipun dana operasional, tenaga pengelola, peralatan pemilahan, dan sistem pencatatan masih terbatas. Nilai 1 (rendah) mencerminkan kondisi saat ini, ketika pengelola aktif sangat sedikit, beban kerja tidak seimbang, fasilitas rusak tidak dapat diperbaiki karena minim anggaran, dan administrasi masih dilakukan secara manual, sehingga upaya yang besar tidak menghasilkan pengurangan sampah yang signifikan. Nilai 2 (sedang) menggambarkan situasi ketika sebagian proses operasional dan administrasi mulai berjalan lebih baik berkat pendampingan atau penggunaan teknologi, namun masih ada pemborosan sumber daya. Nilai 3 (tinggi) berarti kebijakan berjalan efisien, dengan pemanfaatan SDM, anggaran, dan peralatan yang optimal, serta sistem kerja yang mampu memaksimalkan hasil meskipun sumber daya terbatas.

Keadilan mencakup pemerataan akses masyarakat terhadap layanan bank sampah, termasuk kelompok berpenghasilan rendah. Keadilan juga menilai apakah beban partisipasi, seperti memilah dan mengumpulkan sampah, terdistribusi merata atau hanya bergantung pada segelintir warga dan pengelola aktif. Nilai 1 (rendah) menggambarkan kondisi saat ini, ketika manfaat bank sampah belum dirasakan secara merata karena banyak unit tidak aktif dan hanya kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan, sementara wilayah lain tidak mendapatkan layanan pengurangan sampah. Nilai 2 (sedang) menunjukkan pemerataan yang mulai membaik, di mana beberapa kecamatan menikmati manfaat bank sampah, tetapi sebagian masyarakat masih belum terjangkau atau belum mendapatkan fasilitas yang layak. Nilai 3 (tinggi) menggambarkan kebijakan yang adil, ketika seluruh kelompok masyarakat, termasuk wilayah dengan bank sampah yang sebelumnya tidak aktif, merasakan manfaat secara merata dan mendapatkan akses yang sama terhadap layanan pengurangan sampah.

Kelayakan politik mencakup sejauh mana suatu kebijakan dapat diterima oleh para pemangku kepentingan, terutama aktor politik seperti pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta masyarakat yang terkena dampaknya. Nilai 1 (rendah) mencerminkan situasi ketika kebijakan tidak mendapat dukungan politik yang memadai, misalnya ketika anggaran tidak dialokasikan dan program pendampingan pemerintah tidak berjalan konsisten sehingga kelembagaan bank sampah tetap lemah. Nilai 2 (sedang) menunjukkan bahwa kebijakan telah memperoleh dukungan sebagian pihak, misalnya adanya regulasi tetapi implementasinya belum optimal sehingga dukungan politik belum sepenuhnya kuat. Nilai 3 (tinggi) berarti kebijakan memiliki legitimasi politik yang kuat, dukungan anggaran dan program pendampingan berjalan konsisten, serta ada komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat bank sampah secara menyeluruh.

Kelayakan administratif berkaitan dengan kesiapan struktur organisasi, SDM, prosedur, dan sarana pelaksanaan kebijakan. Nilai 1 (rendah) mencerminkan kondisi saat ini, yaitu struktur kelembagaan yang tidak stabil, minim SDM aktif, fasilitas rusak, SOP tidak seragam, dan koordinasi antar unit lemah sehingga kebijakan sulit dijalankan. Nilai 2 (sedang) menunjukkan bahwa bank sampah sudah dapat beroperasi tetapi masih memerlukan peningkatan kapasitas, supervisi pemerintah, dan perbaikan sarana agar tugas kelembagaan dapat berjalan lebih konsisten. Nilai 3 (tinggi) menunjukkan kesiapan administratif yang baik, di mana ada SOP yang seragam, fasilitas memadai, SDM cukup dan kompeten, dan koordinasi dengan pihak DLHK berjalan efektif sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Analisis Alternatif Kebijakan.

Ada 2 alternatif kebijakan yang dirumuskan untuk dievaluasi, dengan mempertimbangkan kondisi empiris yang ditemukan pada bank sampah di Kota Palembang. Alternatif kebijakan pertama berfokus pada penguatan kelembagaan bank sampah agar dapat berfungsi secara optimal, mandiri, dan berkelanjutan. Alternatif kebijakan kedua berupa digitalisasi pengelolaan Bank yang menempatkan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat kelembagaan dan operasional bank sampah yang selama ini masih lemah.

1. Penguatan Kelembagaan Bank Sampah

Alternatif kebijakan pertama berfokus pada penguatan kelembagaan bank sampah agar dapat berfungsi secara optimal, mandiri, dan berkelanjutan. Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas manajemen pengurus, penyusunan SOP yang seragam, serta pembentukan jaringan koordinasi antar bank sampah di Kota Palembang. Pemerintah Daerah melalui DLHK perlu menyediakan pendampingan rutin, bimbingan teknis, dan supervisi langsung agar pelaksanaan tugas internal tidak hanya bertumpu pada sedikit pengurus aktif.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa permasalahan kelembagaan sangat nyata di lapangan. Pengelola Bank Sampah Kartini menjelaskan bahwa meskipun struktur organisasinya terlihat lengkap, hanya empat pengurus yang masih aktif menjalankan operasional harian.

> *"Sebenarnya jika dilihat dari struktur organisasi tersebut cukup banyak, tetapi saat ini yang aktif bekerja hanya empat orang saja."* – *Bapak Mamat, Pengelola Bank Sampah Kartini* (*Wawancara Tanggal 9 Oktober 2025*).

Proses pemilahan sampah bahkan hanya dilakukan oleh satu orang selama dua hingga tiga jam setiap hari karena keterbatasan SDM. Minimnya tenaga ini berdampak pada rendahnya konsistensi layanan dan terhambatnya efektivitas operasional. Selain itu, beberapa fasilitas utama seperti mesin pencacah plastik, mesin kompos, dan alat produksi pupuk sudah tidak lagi berfungsi akibat kerusakan dan ketiadaan biaya perawatan. Peralatan tersebut sebelumnya sempat beroperasi selama sekitar satu tahun saat masih ada pendampingan dari program CSR, namun setelah bantuan berakhir, kegiatan mulai berkurang dan alat tidak lagi digunakan.

Penguatan fasilitas seperti mesin pencacah, mesin press, komposter, timbangan, dan kendaraan pengangkut karenanya menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan fungsi operasional bank sampah. Namun penguatan fisik perlu dibarengi peningkatan kapasitas SDM.

Kehadiran bank sampah akan efektif dalam mengatasi masalah penumpukan sampah jika diikuti oleh partisipasi aktif dari warga. Hasil wawancara dengan Pak Mamat selaku Pengelola Bank Sampah Kartini, juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah karena sebagian warga menganggap proses pemilahan sampah merepotkan.

> *"Masyarakat menunjukkan dukungan dengan berpartisipasi menyerahkan sampah ke bank sampah, namun masih ada sebagian yang bersikap kurang peduli. Untuk meningkatkan partisipasi, pengelola memberikan berupa pihak biasanya insentif pembelian sampah agar masyarakat lebih termotivasi dalam mengumpulkan dan memilah sampah. Hal ini dilakukan karena sebagian masyarakat menilai proses pemilahan antara sampah organik dan anorganik cukup merepotkan, sehingga mereka cenderung memilih untuk langsung membuang sampah tanpa memilah terlebih dahulu."* (Wawancara Tanggal 9 Oktober 2025).

Untuk itu diperlukan pelatihan pengurus dalam manajemen organisasi, administrasi keuangan, pemasaran produk daur ulang, serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Inovasi seperti skema tabungan sampah, program insentif, atau kolaborasi dengan UMKM dan off-

taker diperlukan untuk meningkatkan motivasi warga. Kemitraan dengan pihak swasta juga perlu diperkuat. Pengalaman Bank Sampah Kartini yang sebelumnya menerima fasilitas dari PT Pusri melalui CSR menunjukkan bahwa dukungan eksternal mampu membantu operasional, namun perlu mekanisme keberlanjutan agar kegiatan tidak berhenti ketika pendampingan berakhir. Dengan rangkaian langkah tersebut, kelembagaan bank sampah diharapkan menjadi lebih stabil, terkoordinasi, dan efektif dalam mengurangi sampah dari sumbernya sehingga beban TPA dapat ditekan.

Dasar pemilihan alternatif ini mengacu pada hasil Palahudin et al. (2024) yang menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan faktor penentu keberhasilan bank sampah, serta temuan Noviyanti et al. (2023) yang menunjukkan pentingnya SOP dalam menjaga konsistensi layanan.

2. Digitalisasi Sistem Pengelolaan Bank Sampah

Alternatif kebijakan kedua berupa digitalisasi pengelolaan bank sampah yang menempatkan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat kelembagaan dan operasional bank sampah yang selama ini masih lemah, hal ini terlihat saat kami mewawancarai pengelola bank sampah kartini yang menunjukkan bahwa pencatatan tabungan dan transaksi masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi selisih data dan keterlambatan dalam penyusunan laporan. Pengurus juga menyampaikan bahwa proses koordinasi dengan pengepul masih dilakukan secara sederhana melalui WhatsApp dan tidak memiliki format pelaporan yang seragam. Masalah-masalah operasional ini menguatkan urgensi digitalisasi sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan akurasi pencatatan.

Digitalisasi tidak hanya memodernisasi pencatatan, tetapi juga menstandarkan prosedur kerja, memperkuat administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas seluruh unit melalui sistem berbasis aplikasi atau web. Dengan sistem ini, pencatatan transaksi, pemilahan, pelaporan keuangan, dan pemantauan keaktifan unit dapat dilakukan otomatis sehingga ketergantungan pada SDM yang terbatas berkurang. Sistem digital juga meringankan beban pengurus karena fitur pencatatan saldo dan penyusunan laporan berjalan otomatis. Melalui dashboard terintegrasi, DLHK dapat memantau kinerja setiap unit secara *real time* dan cepat mengidentifikasi unit yang tidak aktif atau membutuhkan intervensi. Digitalisasi sekaligus memperkuat fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang selama ini terhambat oleh administrasi manual. Di sisi lain, digitalisasi meningkatkan partisipasi masyarakat melalui aplikasi tabungan sampah yang memungkinkan warga memantau saldo, riwayat setoran, dan jadwal pengumpulan sampah. Transparansi ini membantu menstabilkan partisipasi dan menarik generasi muda untuk terlibat.

Pemilihan opsi ini didukung oleh temuan Farhan & Setiaji (2023) yang menunjukkan bahwa sistem digital mampu meningkatkan akurasi pencatatan.

Perbandingan kedua alternatif menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lebih mampu menjawab permasalahan yang ditemukan pada aspek operasional, sedangkan digitalisasi lebih sesuai diterapkan setelah kapasitas dasar kelembagaan terbentuk dengan baik.

Tabel 1. Perbandingan Keuntungan dan Kerugian Alternatif kebijakan

Alternatif Kebijakan	Keuntungan	Kerugian
Penguatan Kelembagaan Bank Sampah	Dapat memperkuat struktur kelembagaan bank sampah secara menyeluruh melalui pelatihan, pendampingan, dukungan standar operasional, penyediaan fasilitas dan pendanaan yang konsisten. Opsi ini mampu meningkatkan profesionalitas pengelola, menstabilkan operasional, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang karena masalah utama yang dihadapi bank sampah memang terletak pada lemahnya struktur kelembagaan.	Memerlukan anggaran cukup besar, dan membutuhkan waktu panjang untuk melihat hasil yang signifikan. Jika pendampingan atau pendanaan kembali tidak konsisten seperti kondisi saat ini, maka bank sampah berpotensi kembali melemah dan tidak mandiri.
	Dapat meningkatkan efisiensi administrasi,	Membutuhkan kesiapan teknologi, pelatihan

Alternatif Kebijakan	Keuntungan	Kerugian
Digitalisasi Sistem Pengelolaan Bank Sampah	memperkuat akuntabilitas, dan mempermudah pemantauan kinerja seluruh unit secara real time.Sistem digital juga mengurangi ketergantungan pada SDM terbatas, meningkatkan transparansi bagi masyarakat, serta mendorong partisipasi melalui akses informasi yang cepat dan mudah.	penggunaan sistem, serta akses internet yang memadai di semua unit bank sampah. Risiko kegagalan bisa muncul jika pengelola tidak mampu mengoperasikan aplikasi atau jika infrastruktur digital tidak merata. Selain itu, digitalisasi tidak akan efektif tanpa penguatan kelembagaan dasar terlebih dahulu.

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2025

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan Metode Perbandingan sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (1981), seluruh alternatif kebijakan yang telah dirumuskan dibandingkan menggunakan kriteria evaluasi yang sama, yaitu efektivitas, efisiensi, keadilan (ekuitas), kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Setiap alternatif diberikan nilai berdasarkan tingkat pencapaiannya terhadap masing-masing kriteria, dengan skala penilaian 1-3 yaitu 1 (rendah), 2 (sedang), dan 3 (tinggi).

Hasil Evaluasi terhadap 2 alternatif kebijakan yang dilakukan dengan menggunakan kriteria dari Dunn, (2018) dan Patton, et al. (2016) menunjukkan bahwa alternatif kebijakan pertama yaitu penguatan kelembagaan bank sampah memiliki tingkat kelayakan paling tinggi dibandingkan alternatif kedua. Pada Alternatif Penguatan Kelembagaan Bank Sampah memperoleh skor tertinggi dalam evaluasi komparatif, yakni 14 poin, dengan nilai tinggi pada seluruh kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi, keadilan (ekuitas), kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Aspek efektifitasnya lebih kuat karena langsung menyasar persoalan mendasar yang ditemukan pada fasilitas, SDM, dan kejelasan prosedur kerja. Aspek efisiensinya lebih tinggi karena perbaikan kapasitas organisasi menghasilkan proses yang lebih lancar. Aspek Keadilannya lebih baik karena peningkatan kualitas layanan memungkinkan masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah akan menerima manfaat secara lebih merata. Kelayakan politiknya tinggi karena DLHK menunjukkan kesiapan untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan. Kelayakan administratifnya juga tinggi karena perbaikan kelembagaan berada dalam ruang kewenangan DLHK.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah Alternatif kebijakan penguatan kelembagaan Bank Sampah sebagai kebijakan utama dengan digitalisasi ditempatkan sebagai dukungan setelah struktur operasional bank sampah membaik.

Tabel 2. Tabel Perbandingan Alternatif Kebijakan

Kriteria Evaluasi	Alternatif Kebijakan	
	Penguatan Kelembagaan Bank Sampah	Digitalisasi Sistem Pengelolaan Bank Sampah
Efektifitas	Tinggi (3)	Tinggi (3)
Efisiensi	Tinggi (3)	Sedang (2)
Keadilan (Ekuitas)	Tinggi (3)	Sedang (2)
Kelayakan Politik	Tinggi (3)	Tinggi (3)
Kelayakan Administratif	Sedang (2)	Tinggi (3)
Jumlah Nilai	**14**	**13**

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2025

Untuk mewujudkan alternatif kebijakan tersebut, maka maka tahapan implementasinya meliputi penyusunan SOP standar di tingkat Kota Palembang, pembentukan struktur organisasi yang jelas di setiap bank sampah, pelatihan pengurus dalam manajemen dan operasional, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas, serta pelaksanaan monitoring rutin oleh DLHK menggunakan format pelaporan yang seragam. Pengembangan kemitraan dengan pengepul dan pihak industri dilakukan untuk memastikan keberlanjutan rantai pasok. Digitalisasi dilakukan secara bertahap setelah pencatatan manual stabil dan kapasitas SDM mencukupi. Implementasi bertahap tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, konsistensi operasional, dan kontribusi bank sampah terhadap pengurangan timbulan sampah di Kota Palembang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah utama pengelolaan bank sampah di Kota Palembang terletak pada lemahnya kapasitas kelembagaan, yang menyebabkan banyak unit tidak mampu beroperasi secara konsisten dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan timbulan sampah kota. Kelemahan tersebut tercermin pada keterbatasan SDM, fasilitas yang tidak berfungsi, pencatatan manual, serta ketiadaan SOP seragam yang seharusnya menjadi standar operasional seluruh unit. Melalui evaluasi kebijakan menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan politik, dan kelayakan administratif, penelitian ini menemukan bahwa penguatan kelembagaan merupakan alternatif kebijakan paling layak karena secara langsung menjawab akar persoalan dan memperoleh dukungan implementatif dari DLHK.

Berdasarkan hasil tersebut, rekomendasi utama penelitian adalah penguatan kelembagaan melalui penyusunan SOP tingkat kota, pembenahan struktur organisasi, peningkatan kapasitas pengurus, perbaikan fasilitas dasar, serta pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala. Implementasi penguatan kelembagaan dilakukan secara bertahap melalui penetapan SOP, pelatihan pengurus, pemulihan fasilitas, penyusunan format pelaporan, dan pendampingan rutin oleh DLHK hingga unit bank sampah beroperasi stabil. Setelah pondasi kelembagaan ini terbentuk, digitalisasi diusulkan sebagai tahapan lanjutan agar sistem pencatatan, pelaporan, dan pengawasan berjalan lebih efisien dan akuntabel.

Digitalisasi dapat diterapkan melalui pengembangan aplikasi atau sistem berbasis web untuk pencatatan transaksi dan tabungan nasabah, integrasi pelaporan dengan dashboard DLHK untuk memudahkan pemantauan real-time, pelatihan operator mengenai penggunaan sistem, serta penyediaan perangkat pendukung seperti smartphone, timbangan digital dan jaringan internet. Implementasinya dilakukan bertahap, dimulai dari uji coba pada unit percontohan sebelum diperluas ke seluruh bank sampah setelah kesiapan SDM dan kepatuhan SOP dinilai memadai. Dengan langkah ini, digitalisasi tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat koordinasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga membuka peluang pengembangan lanjutan berupa model integrasi digital tingkat kota, kemitraan dengan industri daur ulang, serta perumusan kerangka keberlanjutan yang dapat memperkuat peran bank sampah sebagai instrumen pengurangan sampah dari sumber secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, N. (2023). *DLHK Palembang Evaluasi 38 Bank Sampah, Diharapkan Miliki Kemandirian*. Sumeks.Co. https://sumeks.disway.id/palembang-update/read/675458/dlhk-palembang-evaluasi-38-bank-sampah-diharapkan-miliki-kemandirian

Fadjarajani, E. S R., Patimah, S., Liriwati, F. Y., Nasrullah, Sriekaningsih, A., Daengs, A., Pinem, R. J., Harini, H., Sudirman, A., Ramlan, Falimu, Safriadi, Nurdiyani, N., Lamangida, T., Butarbutar, M., Wati, N. M. M., Rahmat, A., Citriadin, Y., Nugraha, M. S. (2020). Studi Pustaka Dalam Penelitian. In *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*.

Farhan, N. M., & Setiaji, B. (2023). Pengembangan Sistem Manajemen Bank Sampah berbasis Web untuk mewujudkan keberhasilan Ekonomi Sirkular di Masyarakat. *Indonesian Journal of Computer Science*, *12*(2), 284–301. http://ijcs.stmikindonesia.ac.id/ijcs/index.php/ijcs/article/view/3135

Agustin, F. M. (2023, October 8). DLHK Palembang Mengakui 38 Bank Sampah Belum Optimal. *IDN TIMES Sumsel*. https://sumsel.idntimes.com/news/sumatera-selatan/dlhk-palembang-mengakui-38-bank-sampah-belum-optimal-00-dvg48-z5mwwt

Fitriana, Y. R., Hapsari, S. N., Hartono, B., Robbani, H. (2024). *Peran Kelembagaan Bank Sampah Nawasena Kemala sebagai Penguat Ekonomi Masyarakat Desa Daleman Kidul*. https://journal.neolectura.com/index.php/Kangmas/article/view/1614/1345

JDIH Kota Palembang. (2025). *Keputusan Wali Kota Palembang No.262 Tentang Panlitia Pelaksana Sosialisasi Sistem tata Cara Pengelolaan Bank Sampah di Kota Palembang.pdf*. https://jdih.palembang.go.id/uploads/SK_NO_262_TAHUN_2025_d92fd41873.pdf

Noviyanti, N., Noviani, H. I., Octaviasari, S., Kemalia, N., Bargoyah, F., Baihaqy, D., & Zulfa, P. S. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Induk Surabaya (Studi Di Bank Sampah Unit Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya). *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu*

Administrasi, *6*(1), 55–71. https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.2997

Palahudin, P., Awa, A., Asmin, E. A., Alam, S., Faujiah, S. N., Fadilah, S. N., & Agustin, A. (2024). Sistem Manajemen Bank Sampah : Peran Bank Sampah Sebagai Solusi Berkelanjutan Bagi Ekonomi Sirkular. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 146–155. https://doi.org/10.55506/arch.v4i1.145

Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2016). *Basic Methods of Policy*.

Pramana, M. I. (2025). *DLH Palembang sebut jumlah sampah meningkat 50 persen saat lebaran*. Antaranews.Com. https://sumsel.antaranews.com/berita/780721/dlh-palembang-sebut-jumlah-sampah-meningkat-50-persen-saat-lebaran

Prasanti, K. S., & Yudhastuti, R. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Rukmi, Gunung Anyar Tambak, Surabaya). *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, *6*(8), 1584–1591. https://doi.org/10.56338/mppki.v6i8.3454

Adityo, R. D., Alya, A. S. (2024). *Optimalisasi Bank Sampah Dusun Delik Dengan Integrasi Sigemas (Sistem Informasi Gerakan Masyarakat Peduli Sampah) Dalam*. *01*(01), 1–10.

Sukmaniar, Saputra, W., Hermansyah, M. H. (2023). Bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah di perkotaan. *Environmental Science Journal (ESJo): Jurnal Ilmu Lingkungan*, *1*(2), 61–67. https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/esjo/article/view/11960

Widodo, S., & Tarigan, L. R. (2025). *Penguatan Kelembagaan Bank Sampah Mutiara Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga*. *5*, 153–168.

William N. Dunn. (2018). sixth edition public polivy analysis an intehrated apporoach. In *Taylor & Francis Group*. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315181226/public-policy-analysis-william-dunn